

**PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA  
(Studi Kabupaten Pesawaran)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Ayu Vaulanda Agustin  
NPM 1916021014**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA (Studi Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh**

**AYU VAULANDA AGUSTIN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini dibatasi hanya kepada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan pariwisata kabupaten Pesawaran. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, pengamatan secara langsung ke tempat lokasi penelitian dan diperkuat dengan adanya bukti dokumentasi. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat membangkitkan pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan erat dengan fungsi *budgeting* atau anggaran, hal itu dikarenakan karena pariwisata Kabupaten Pesawaran berkaitan erat dengan pelaksanaan peraturan daerah (anggaran). Fungsi pengawasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai sudah baik dan efektif namun ada beberapa objek wisata yang masih dikelola oleh pengelola lahan sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Dinas Pariwisata hanya mengawasi, memfasilitasi sarana dan prasarana hingga mempermudah akses pengunjung menuju objek wisata di Pesawaran sehingga dalam pelaksanaan dari mengukur ukuran pelaksanaan, memberikan penilaian, dan mengadakan korektif serta fungsi dan peran pengawasan sudah dapat dikatakan ideal karena pelaksanaannya sudah tercapai melalui evaluasi kerja.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pariwisata, Pengelolaan Pariwisata.

## **ABSTRACT**

### **DPRD SUPERVISION IN TOURISM MANAGEMENT (Study of Pesawaran District)**

**By**

**AYU VAULANDA AGUSTIN**

This study aims to find out how the supervision is carried out by the Regional Representatives Council of Pesawaran Regency in the management of tourism in Pesawaran Regency. The discussion in this study is limited only to the supervision carried out by the Regional People's Representative Council on tourism management in Pesawaran district. Researchers used descriptive qualitative research types, and data collection techniques by conducting interviews, direct observation to the research location and strengthened by documentary evidence. Pesawaran Regency is one of the areas that has natural resource potential that can generate economic development for the people of Pesawaran Regency. The results of the study concluded that the supervisory function carried out by the Regional People's Legislative Assembly is closely related to the budgeting function, this is because tourism in Pesawaran Regency is closely related to the implementation of regional regulations (budget). The supervisory function of the Regional People's Representative Council is considered good and effective, but there are several tourist objects that are still managed by land managers so that the Regional People's Representative Council through the Tourism Office only supervises, facilitates facilities and infrastructure to facilitate visitor access to tourist objects in Pesawaran so that in implementation from measuring the size of the implementation, giving an assessment, and carrying out corrective as well as the function and role of supervision can be said to be ideal because the implementation has been achieved through work evaluation.

**Keywords:** Oversight Function, Regional House of Representatives, Tourism Office, Tourism Management.

**PENGAWASAN DPRD DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA  
(Studi Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh**

**Ayu Vaulanda Agustin**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi

: **PENGAWASAN DPRD DALAM  
PENGELOLAAN PARIWISATA  
( Studi Kabupaten Pesawaran )**

Nama Mahasiswa

: *Ayu Waulanda Agustin*

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1916021014**

Program Studi

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

*Darmawan Purba*  
**Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**

**NIP. 19810601201003**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

*Drs. R. Sigit Krisbintoro*

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**

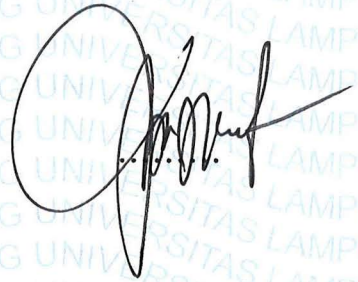
**NIP. 196112181989021001**



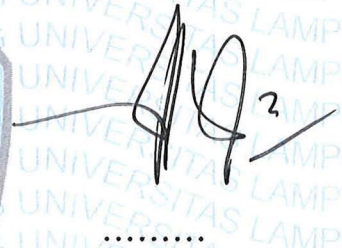
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.**



**Penguji : Bendi Juantara, S.I.P., M.A.**



.....



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 April 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 02 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Vaulanda Agustin

NPM. 1916021014



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Vaulanda Agustin, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 10 Agustus 2000 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sobari dan Ibu Sri Suyatmi.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Darsa Bakti Pesawaran pada tahun 2005-2007, dilanjutkan di SDN 03 Margomulyo pada tahun 2007-2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 09 Metro pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Metro pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.

Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.



## **MOTTO**

“Berbuat baiklah tanpa perlu alasan ”

(Ayu Vaulanda Agustin)

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang diulang dari hari demi hari”

(Ayu Vaulanda Agustin)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,  
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak  
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Mbah tersayang

**Sobari dan Sri Suyatmi serta Mbah Sunarwi dan Mbah Sujianto**

Adikku

**Berta Pramudita, Cahaya Mutiara Ramadhani, Dinar Berlian Mulia Putri**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan Pariwisata ( Studi Kabupaten Pesawaran )”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan Pariwisata ( Studi Kabupaten Pesawaran )”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;



3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Bapak Bendi Juantara S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Dosen Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kepada Kedua orang tua Penulis, Ayah Sobari dan Ibu Sri Suyatmi yang selalu mengiringi doa di setiap langkah Penulis;
9. Kepada Mbah Penulis, Mbah Sunarwi, Mbah Sujianto, yang selalu mengiringi doa di setiap langkah Penulis;
10. Kepada Adik Penulis, Berta Pramudita, Cahaya Mutiara Ramadhani dan Dinar Berlian Mulia Putri terimakasih telah mewarnai hari-hari Penulis;
11. Kepada Muhammad Ivan Dwi Saputra, terimakasih sudah menemani dari awal masuk SMA sampai masuk Kuliah, terimakasih juga sudah menemani dan membantu dari awal perskripsian hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Penulis, Om, Bibi, Bude, Pakde, Mba, Mas, Adek terimakasih selalu ada dan mendukung serta selalu menasehati Penulis;
13. Kepada informan Peneliti, Bapak Ollan, Bapak Kamil, Bapak Aris, Mba Anis, Bang Aan, Mba Meli, Bu Eem;
14. Kepada Seluruh Dewan, ASN dan jajaran Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya;

15. Kepada Bapak dan Ibu Lurah, Staf kelurahan, dan Karang Taruna di Desa Sidodadi, Kec. Way Lima terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis;
16. Kepada Sahabat Penulis, Ike Nurafni, Anita Feby, Deadora, Oksa, Desy, Restu, Agun, Irma, Intan Anisa, Sela, Riki, Laila, Syfa, Sona, Tiara, Ari Puspita, Selsa, Vivit, Syeli, Mas Hajad. Terimakasih telah membuat hari-hari Penulis lebih indah dan berwarna;
17. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023

Penulis,

Ayu Vaulanda Agustin

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Industri Pariwisata.....	13
2.1.1 Jenis dan Macam Pariwisata .....	14
2.1.2 Manfaat dan Tujuan Pariwisata .....	19
2.2 Teori Pengawasan .....	21
2.3 DPRD Dalam Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2015 .....	23
2.4 Fungsi Pengawasan DPRD .....	25
2.5 Pengelolaan Pariwisata.....	30
2.6 Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Informan Penelitian.....	35
3.5 Jenis Data Penelitian .....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	39
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran .....	41



4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran .....	43
4.2.1 Tugas Sekretariat DPRD Pesawaran .....	45
4.3 Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran .....	46
4.3.1 Fungsi Dinas Pariwisata Pesawaran .....	50
4.3.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pesawaran .....	55

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian dan Wawancara Peran DPRD Terhadap Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran .....	57
5.1.1 Hasil Wawancara Penelitian Peran DPRD Komisi II Terhadap Pengelolaan Pariwisata dan Fungsi Pengawasan .....	57
5.1.2 Hasil Wawancara Penelitian Peran Dinas Pariwisata Terhadap Pengelolaan Pariwisata dan Fungsi Pengawasan .....	62
5.1.3 Hasil Wawancara Pengelola Lahan Wisata dan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Pariwisata dan Fungsi Pengawasan .....	67
5.2 Pembahasan.....	74
5.2.1 Menentukan ukuran pelaksanaan .....	74
5.2.2 Memberikan Penilaian.....	77
5.2.3 Mengadakan Korektif.....	80

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	86
6.2 Saran.....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel Data Pengunjung Objek Pariwisata di Pesawaran .....	3
2. Tabel Pendapatan dari Sektor Pariwisata Provinsi Lampung 2017-2021 .....	4
3. Tabel Penelitian Terdahulu .....	8
4. Tabel Daftar Nama Informan Penelitian .....	35
5. Tabel Nama Struktur Komisi II DPRD Pesawaran.....	42
6. Sumber Daya Dinas Pariwisata Pesawaran .....	55
7. Tabel Data Realisasi Fasilitas Objek Wisata Pesawaran .....	79
8. Tabel Trianggulasi Data Penelitian.....	82

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Gambar Kerangka Pikir Penelitian .....	33
2. Gambar Peta Kabupaten Pesawaran .....	42
3. Gambar Data Kunjungan Pariwisata Pesawaran Th 2021 .....	65



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah provinsi yang banyak dan memiliki beraneka ragam suku, ras, dan juga budaya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keindahan alam baik itu daratan maupun keindahan laut. Dengan banyaknya destinasi wisata ini, Indonesia mampu menarik perhatian warga negara asing yang menjadikan destinasi wisata sebagai tempat tujuan wisata, rekreasi, atau liburan. Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan ke suatu tempat dan ketempat yang lainnya, pariwisata ini biasanya berhubungan dengan rekreasi atau hiburan ke suatu tempat yang diharapkan dapat memberikan kehangatan ataupun melepas penat para wisatawan saat berada di tempat rekreasi.

Pariwisata mempunyai peran besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi salah satu sumber devisa negara. Pariwisata akan menambah pendapatan yang dapat menghasilkan devisa negara dikarenakan sektor pariwisata berkaitan dengan penanaman modal warga asing seperti turis-turis yang berkunjung ke Indonesia yang memiliki kepentingan bisnis dengan Indonesia (Bahari & Ashoer, 2018). Hasil riset dari WTO (*World Tourism Organization*) pada tahun 2020 mencatat perjalanan wisata dunia mencapai 1,4M orang dan diantaranya 448juta orang akan berkunjung ke kawasan Asia-Pasifik dan hal tersebut mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Tercatat dari BPS Indonesia sejak Januari sampai Desember 2019 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai

16.113.467 orang, yang berarti meningkat 1,88% dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 dan jumlah kunjungan tersebut makin bertambah dari tahun ketahun (*bps.go.id, 2022*).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam bahari ialah provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak dibagian barat pulau Sumatera dan kawasannya dikelilingi oleh laut. Provinsi Lampung dikenal dengan julukan “*The Tresure Of Sumatera*” karena Lampung memiliki banyak tempat indah yang harus dijelajahi bagi wisatawan dan memiliki potensi dibidang pariwisata khususnya wisata bahari. Provinsi Lampung mempunyai luas 35.376,50Km<sup>2</sup> dan Provinsi Lampung memiliki garis pantai yang cukup panjang disebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Lampung memiliki keindahan alam yang berlimpah dan menjadikan provinsi ini sebagai salah satu potensi pengenalan potensial dari sisi keindahan baharinya baik itu dari pihak mancanegara atau wisatawan lokal untuk berkunjung ke objek wisata yang dapat menciptakan kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki keindahan alam dan berpotensi sebagai sektor pariwisata ialah Pesawaran. Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 2,243,51km<sup>2</sup> yang memiliki berbagai jenis wisata bahari yang dapat menjadi solusi untuk objek wisatawan, Kabupaten Pesawaran tidak hanya dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga keindahan wisata baharinya yang mempunyai daya tarik yang sangat mengagumkan dan merupakan salah satu sektor penting di Indonesia.

Tabel 1 Data Pengunjung Objek Pariwisata di Pesawaran

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pesawaran</b>
<b>2017</b>	928.500 jiwa
<b>2018</b>	1.155.875 jiwa
<b>2019</b>	1.387.029 jiwa
<b>2020</b>	873.829 jiwa
<b>2021</b>	1.135.978 jiwa

*Sumber: Dinas Pariwisata Pesawaran, 2022*

Berdasarkan hasil data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 meskti pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang disebabkan oleh wabah covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 adaptasi pada kebiasaan baru pasca pandemi covid-19 persentase pengunjung kembali normal dengan data pertumbuhan kunjungan yang mengalami peningkatan sebesar 30%. Dan dapat mulai kembali menggerakkan konsistensi pariwisatanya yang dapat dilihat dari pergerakan jumlah pengunjung setelah pandemi covid-19. Dengan adanya pariwisata di Kabupaten Pesawaran hal ini dapat menjadi strategi yang cukup baik untuk pariwisata bahari di Lampung yang potensial.

Adapun beberapa sektor pariwisata potensial yang terdapat di Kabupaten Pesawaran ialah wisata Pulau Pahawang, Pulau Legundi, Pulau Kelagian, Pulau Tangkil, Pulau Tanjung Putus, Pulau Tegal Mas, Pulau Mahitam, Pantai Mutun, Pantai Klara, Pantai Dewi Mandapa, Pantai Sari Ringgung, Pantai Batu Mandi, wisata alam TAHURA, Air Terjun Sinar Tiga, Air Terjun Anglo, dan objek wisata lainnya. Dengan berbagai macam objek wisata potensial yang ada di Kabupaten Pesawaran ini, masyarakat dan pemerintahan daerah Pesawaran harus saling bekerja sama untuk prospek dan strategi bertahannya potensi alam yang terdapat di Kabupaten Pesawaran, banyaknya sektor wisata di Pesawaran akan memperluas informasi dan pengetahuan pengunjung terkait Kabupaten Pesawaran yang semakin dikenal diberbagai wilayah di Indonesia bahkan mancanegara.

Namun meskipun Kabupaten Pesawaran Pemerintah dapat melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat yaitu peran dan inisiatif masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan kepariwisataan di daerah Pesawaran, lalu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan serta meningkatnya nilai manfaat pembangunan kepariwisataan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata. Pentingnya penjagaan sektor pariwisata ini juga harus diiringi pemantauan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Lembaga Pemerintah ini disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga Pemerintahan ini pada umumnya dikenal sebagai lembaga pengontrol kekuasaan pemerintah di tiap daerah, jadi dengan kata lain DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah terhadap wilayahnya sendiri.

Budiarjo (2008) menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga legislative yang membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan kebijakan-kebijakan tersebut atau dapat diartikan sebagai badan yang membuat keputusan mengangkut kepentingan umum. Pentingnya keberadaan DPRD dalam mengawasi pengelolaan pariwisata di Pesawaran akan berdampak pada pendapatan dari sektor wisata, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2 Pendapatan dari Sektor Pariwisata Provinsi Lampung 2017-2021

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Sektor Pariwisata</b>	<b>Kenaikan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2017</b>	71.876.105.748	-	-
<b>2018</b>	78.673.529.071	6.797.423.508	19%
<b>2019</b>	84.013.205.908	5.339.676.982	23%
<b>2020</b>	67.107.108.075	-16.906.097	12%
<b>2021</b>	81.957.395.103	14.850.287057	19%

Sumber: BPS.go.id, 2022.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan sektor wisata dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, kemerosotan pendapatan sektor pariwisata terjadi pada tahun 2020 dimana hal

tersebut terjadi karena dampak dari pandemi covid-19 yang mana pada saat itu berbagai sektor industri di Indonesia mengalami kemunduran secara besar-besaran. Namun pada tahun 2021 pendapatan sektor pariwisata sudah mulai bangkit kembali dengan adanya adaptasi pasca pandemi covid-19 sehingga mulai mengembalikan sektor wisata. Untuk itu pemerintah harus mampu melaksanakan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah harus menyerap dan mengakomodir aspirasi secara tepat dan benar tentang bagaimana kondisi pembangunan dimasing-masing wilayah yang berhubungan dengan infrastruktur, sumber daya manusia, ataupun sektor wisata, Pembangunan yang efektif dan tepat tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran melainkan kualitas perencanaan, kualitas *monitoring* dan evaluasi, koordinasi, kualitas partisipasi masyarakat yang dapat menentukan manfaat pembangunan wilayah Provinsi Lampung ([biroadpim.lampungprov.go.id](http://biroadpim.lampungprov.go.id), 2022). Selain itu, pemerintahan juga dapat meningkatkan dan mengelola pembangunan sarana prasarana yang dapat menunjang akses kegiatan para wisatawan yang akan melakukan wisata ke Kabupaten Pesawaran.

Pentingnya kerjasama pengelolaan objek wisata Pesawaran ini akan berdampak pada pendapatan wilayah yang dapat memajukan ekonomi daerah. Namun hingga saat ini, sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran masih milik masyarakat sekitar dan pihak DPRD Pesawaran hanya menaungi dan ikut serta berperan juga membantu pengelolaan objek wisata dan mengawasi sektor pariwisata di Pesawaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran yang berhubungan dengan pariwisata disebut dengan Komisi II.

Dalam membangun pariwisata yang baik berkelanjutan, maka diperlukan perubahan pola pikir dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kunci penting untuk memperkuat dan meletakkan konsep pembangunan pariwisata. Dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang efektif, pariwisata dapat memberikan dampak yang positif bagi ekonomi, sosial budaya,

dan lingkungan. Sebaliknya pun bisa terjadi jika perencanaan pembangunan disusun secara sembarangan dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan (www.pusdiklatpemda.com, 2022). Adapun penjelasan dari 4 (empat) pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Peran DPRD pengelolaan destinasi pariwisata
- Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal
- Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung
- Pelestarian lingkungan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas dalam pembangunan di Indonesia saat ini karena memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan secara khusus bagi daerah-daerah di Indonesia yang menyimpan potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan beragam, yang layak untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata dalam implementasi peran dan fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan “*good governance*” (www.pusdiklatpemda.com, 2022).

Dengan adanya kerjasama antar masyarakat dan DPRD Pesawaran, maka pengawasan terhadap aktivitas objek wisata diharapkan dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintahan daerah. Tujuan dilakukannya kontrol atau pengawasan ini adalah agar pada saat menjalankan tugasnya, yang bersangkutan tidak akan melakukan penyimpangan dari peraturan yang sudah ditetapkan karena fungsi pengawasan merupakan bentuk dari tindakan untuk mengawasi kebijakan pemerintah (Anam & Anwar, 2020). Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat diperlukan adanya peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya.

Keberadaan peraturan daerah ini merupakan sebuah bentuk dari kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur wilayahnya

sendiri. Fungsi pengawasan merupakan sebuah wewenang institusi parlemen dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dan termasuk juga dalam hal pariwisata. Hubungan kepariwisataan Kabupaten Pesawaran dengan Pemerintah daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Pariwisata merupakan ujung tombak penentu keberhasilan kepariwisataan daerah. Memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan. Maka dari itu DPRD harus melewati tantangan utamanya bagaimana DPRD dapat menciptakan mekanisme kerja yang mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan dan bekerja sama dengan masyarakat (Dilapanga, et al., 2020).

Salah satu kebutuhan kepentingan rakyat ialah keefektivan DPRD dalam pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pemerintah Pesawaran harus mampu memberikan solusi untuk mewujudkan pariwisata yang menarik perhatian para pengunjung agar dapat memaksimalkan pengelolaan objek wisata. Pemerintah dapat menjadi solusi terhadap perencanaan, sarana penunjang, serta aksesibilitas menuju lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Lembaga badan legislative sebagai fungsi *check and balance* diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pihak Dinas Pariwisata Pesawaran dalam peningkatan kualitas pariwisata di daerah Pesawaran dan kepercayaan masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Fungsi pengawasan seringkali menggunakan model *direct control* pengawasan langsung yang digunakan untuk pemanggilan atau sidak pada objek yang dituju.

Untuk dapat mencapai sasaran pariwisata baik bahari maupun wisata daratan diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang tepat dan efisien agar mencapai tujuan kepariwisataan sebagai wahana dalam mencapai sasaran dan tujuan pariwisata nasional (Arso & Abas, 2021). Apapun bentuknya pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah keberlangsungan wisata dengan



melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan. Seperti halnya fungsi pengawasan yang dilakukan pada penelitian ini, DPRD Pesawaran cenderung melakukan pengawasan langsung terhadap Komisi II sebagai mitra kerja yang berupa inspeksi (pengamatan) pada objek, pemanggilan, dan rekomendasi langsung. Ketika melakukan pengawasan, efektif atau tidaknya sebuah program kerja (pembangunan kepariwisataan) harus memenuhi kriteria *output* (pengeluaran) dengan *outcome* (hasil) yang sudah dicapai melalui fungsi pengawasan DPRD.

Untuk membantu pengelolaan pariwisata Pesawaran dan memajukan sektor pariwisata, pemerintah daerah saat ini sudah menerbitkan banyak kebijakan yaitu adanya kerja sama dengan pengelola lahan, pajak, asuransi pengunjung wisata, serta subsidi kepada para pelaku industri pariwisata. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar daerah yang mencakup secara luas. Adapun usaha yang akan dilakukan pada bidang pariwisata adalah adanya pengembangan bisnis penginapan atau *homestay* yang berada disekitar objek wisata untuk mempermudah pengunjung ketika ingin melakukan wisata, selain itu adanya kerjasama bisnis di bidang kuliner dan bisnis penyedia penyewaan kendaraan atau transportasi yang mempermudah akses menuju lokasi wisata di Pesawaran dan adanya penyediaan jasa penunjang komunikasi, air dan listrik di objek wisata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata. Namun, program pemerintah dalam rangka meningkatkan pengelolaan pariwisata kerap kali mengalami penundaan yang disebabkan oleh adanya pendanaan yang belum

tersalurkan secara merata karena banyaknya objek wisata sehingga pemerintah daerah harus memilah objek wisata yang didahulukan. Untuk itu, peneliti melakukan studi awal yang dilakukan pada bulan September 2022 peneliti ingin melihat pengawasan DPRD dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran.

Adapun penelitian sejenis yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini adalah: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Anwar & Anam, 2020) mengenai “Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik” dengan hasil bahwa pada kenyataannya mekanisme *control* pengawasan DPRD terhadap pelayanan public di Kabupaten Pamekasan kadang kala terhambat oleh faktor instrinsik misalnya, faktor internal institusi menyangkut keterbatasan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam membantu anggota legislative menjalankan kinerjanya, terkooptasi oleh hirarki kebijakan sebagai legal standing anggota legislative melakukan pengawasan, dan faktor iklim politik parlemen yang terbelah pada poros koalisi dan oposisi. Disisi lain, pengawasan yang didukung oleh alat kelengkapan DPRD komisi-komisi sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah harus didukung oleh aspek hukum yang kuat, didukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh fasilitas yang memadai dan didukung oleh tim sekretariat dewan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Arso & Abas, 2021) mengenai “Konsistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD 2019” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 secara yudiris sudah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Namun dalam prakteknya (*de facto*) masih banyak ketimpangan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Persoalan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan adalah terkait dengan kompetensi anggota DPRD, ketidakjelasan system pengawasan,

perbedaan preferensi dan rekomendasi sebagai output pengawasan yang tidak disertai penegakan sanksi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Bagunda, et al, 2019) mengenai “Manajemen Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pariwisata dilakukan oleh masing-masing individu dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa dalam proses perencanaan, pengorganisasian, dan juga pelaksanaan mereka berhasil melakukan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan yang mengacu pada aturan yang berlaku.

Keempat, (Loda., et al, 2019) mengenai “Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat “ yang menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harappn. Peraturan Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalankan legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal sebagai mana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Perda sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Kelima, (Bantuan., et al, 2019) mengenai “Analisis Efektivitas Kinerja Pendapatan (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016-2018)” dengan hasil menunjukkan bahwa faktor penyebab realisasi pendapatan tidak mencapai target karena terlalu tingginya target pendapatan yang dibebankan ke Dinas, sedangkan sumber pendapatan yang dikelolasantag terbatas, namun keefektivan dinilai bagus tetapi naik turun tiap tahunnya, maka dari itu disarankan Dinas Pariwisata agar dapat

lebih fokus pada penambahan objek wisata agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Keenam, (Khairiah & Safira, 2021) mengenai “Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pariwisata Kota Medan” yang menunjukkan bahwa pengawasan internal dalam kinerja pegawai termasuk dalam kategori tinggi dan terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pegawai di Dinas Pariwisata Kota Medan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang berkaitan judul peneliti saat ini, tetapi yang menjadi dasar nilai pembaharuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini ingin meneliti lebih jauh tentang peran pengawasan komisi II DPRD dalam pengelolaan pariwisata Pesawaran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Pariwisata (Studi Kabupaten Pesawaran)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini ialah: bagaimana pengawasan DPRD dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan pariwisata Pesawaran.

## **1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pemikiran, informasi, dan juga bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pengetahuan, pengalaman, maupun wawasan dalam menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan teoriti yang diteliti khususnya mengenai peranan fungsi pengawasan DPRD dalam melihat pengelolaan sektor pariwisata.

#### b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan baik pada pariwisata daerah dan melihat manfaat adanya fungsi pengawasan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Industri Pariwisata

Menurut Yoeti (2015) Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”. Pariwisata saat ini dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang masing-masing individu dan tidak mempunyai batasan- batasan yang pasti tentang arti pariwisata.

Pariwisata akan timbul pada keadaan yang berhubungan dengan perjalanan yang tidak diniatkan untuk menjadi tempat menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari penghasilan. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, daya tarik wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata (Swesti, 2019). Pariwisata merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan keluar masuknya individu maupun kelompok kesuatu tempat atau daerah.

Kegiatan pariwisata saat ini merupakan sebuah fenomena kebutuhan yang ditimbulkan dari kegiatan sehari-hari dan berfungsi untuk menghilangkan rasa penat. Kegiatan pariwisata dilakukan dengan melakukan perpindahan tempat

tinggal sementara dan secara singkat pada suatu wilayah. Pariwisata biasanya didukung oleh berbagai fasilitas yang mendasari suatu tempat dijadikan objek wisata, seperti terdapat tempat yang berpotensi sebagai tempat wisata, fasilitas yang disediakan, fenomena alam yang ada disekitar wilayah tersebut, dan budaya yang menarik perhatian wisatawan. Sahara, et al (2016) menyebutkan bahwa terdapat faktor penting dalam kepariwisataan, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu
2. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain
3. Perjalanan berkaitan dengan rekreasi atau hiburan
4. Individu atau kelompok yang melakukan perjalanan tidak mencari nafkah di tempat pariwisata yang mereka kunjungi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang didukung dengan segala fasilitas sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai pihak baik wisatawan atau pengunjung, masyarakat dan pemerintah setempat dan kegiatannya hanya dilakukan untuk jangka waktu yang relatif singkat guna melepaskan penat dari masing-masing individu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan wisata dan wisatawan yang melakukan kegiatan berwisata tidak menciptakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

### **2.1.1 Jenis dan Macam Pariwisata**

Suwena, et al., (2017) menyebutkan bahwa jenis dan macam pariwisata dapat dibedakan menjadi:

1. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata dapat dibedakan menjadi:
  - Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.



- Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional.
  - Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut.
  - Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut.
  - Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.
2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran:
- Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
  - Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.
3. Menurut alasan/tujuan perjalanan:
- *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain

- *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain.
  - *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contoh: *studytour*.
  - *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjagsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
  - *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
  - *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.
  - *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
4. Menurut saat atau waktu berkunjung:
- *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musimmusim tertentu.
  - *Occasional tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu even.
5. Menurut Objeknya:
- *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
  - *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.

- *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
  - *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.
  - *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara
  - *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan.
  - *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan.
  - *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
6. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan:
- *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.
  - *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
  - *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour oprator/ travel agent*.

7. Menurut alat pengangkutan yang digunakan:

- *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
- *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.
- *Air tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.

8. Menurut umur yang melakukan perjalanan:

- *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
- *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.

9. Menurut jenis kelamin:

- *Masculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti safari, *hunting*, dan *adventure*.
- *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.

10. Menurut harga dan tingkat sosial:

- *Delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun atraksinya.
- *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.
- *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.

### 2.1.2 Manfaat dan Tujuan Pariwisata

Menurut Pendit (2010) terdapat manfaat dan tujuan dari pariwisata, pariwisata dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan (laut maupun udara), jalan-jalan raya, pengangkutan didaerah setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan, dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi wisatawan dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan, maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, di mana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah industri lainnya.

Adapun yang menjadi manfaat pariwisata, yaitu:

1. Meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara.
2. Membuka kesempatan kerja serta perluasan lapangan pekerjaan bagimasyarakat.
3. Merangsang dan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pendapatan daerah, dan devisa negara.
5. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan.
6. Membantu dan menunjang gerak pembangunan, seperti penyediaan saranadan prasarana yang diperlukan.
7. Menjaga kelestarian flora, fauna, dan lingkungan.

Sedangkan Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan ialah:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata
2. Memupuk rasa cinta tanah air
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.

Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan (Wicaksono & Yunitasari, 2018). Menurut Rosa (2018) mengemukakan pengertian obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berdasarkan definisi tersebut objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata.

Dalam kedudukan yang sangat menentukan tersebut adalah daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Umumnya daya tarik suatu wisata adalah berdasarkan hal-hal berikut:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan yang hadir.
5. Untuk objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

## **2.2 Teori Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu bentuk pengontrolan atau pemeriksaan yang berasal pihak tertentu terhadap kegiatan yang dibuat dari pihak dibawahnya. Pengawasan adalah proses penetapan pekerjaan yang telah dilaksanakan, kemudian pekerjaan itu akan dinilai dan dikoreksi bila perlu dengan upaya pelaksanaan terpenuhi sesuai rencana (Adnan, 2016). Pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dari seluruh kegiatan guna menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya



(Prayudi, et al, 2018). Pengawasan secara spesifik sesuai dengan fungsi DPRD, menurut (Busro, 2018) lebih sering disebut dengan *oversight* yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

Untuk itu, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap lembaga eksekutif yang diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin semua peraturan atau kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya oleh DPRD dan lembaga lembaga publik (Marsa, 2020). Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sebuah proses memonitor atau memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi pengawasan juga merupakan sebuah tindakan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang telah atau mungkin terjadi karena pengawasan yang baik ialah langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Pengawasan mempunyai tujuan sebagai bentuk minimalisir kemungkinan adanya penyimpangan, pengawasan dapat berupa evaluasi capaian kerja organisasi dalam menyusun, menganalisis, mengerjakan, serta mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai. Menurut (Kartono, 2016) terdapat 3 indikator pengawasan:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan: yaitu cara-cara untuk mengukur pelaksanaan, adanya beberapa syarat minimal dalam melakukan pengawasan seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari, ukuran pelaksanaan ini tujuannya untuk mendapatkan perbandingan hasil ketika kegiatan dilakukan.
2. Memberikan penilaian: memberi nilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.

3. Mengadakan korektif: Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan. Tindakan dalam mengambil keputusan atau evaluasi perbaikan, apabila telah terjadi penyimbangan antara standar dengan kegiatan dilapangan maka perlu melakukan tindakan yang berupa koreksi terhadap penyimpangan tersebut.

Pengawasan merupakan sebuah informasi yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan dan akan berdampak pada tindakan koreksi dan evaluasi, informasi ini merupakan hasil pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.

### **2.3 DPRD dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah (Undang-undang Pasal 9 ayat 4 No. 9 Tahun 2015). Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPRD mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, tugas dan wewenang DPRD, ialah:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan bersama,

- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala Daerah,
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah,
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur,
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah,
- f. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi,
- g. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

### 3. Hak DPRD

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan Pendapat

Hak anggota DPRD ialah sebagai berikut:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah,
- b. Mengajukan Pertanyaan,
- c. Menyampaikan Usul dan Pendapat,
- d. Memilih dan Dipilih,
- e. Membela Diri,
- f. Imunitas,
- g. Protokoler,
- h. Keuangan dan Administratif

Sedangkan kewajiban DPRD ialah:

- a. Mengamalkan Pancasila,
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan,
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat,
- g. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,
- h. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya,
- i. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD,
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

## **2.4 Fungsi Pengawasan DPRD**

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD, fungsi ini diwujudkan melalui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 sebagai salah satu tugas dan wewenang DPRD; *“melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”*.

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dimaksudkan adalah fungsi yang dijalankan oleh DPRD dalam bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis dan strategis dan mencakup pada pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks ini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus pengelolaan yang ada di daerah.

Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik dengan hasil akhir yang “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini dapat memberikan penegasan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan atau target. Fungsi pengawasan menjadi titik yang menentukan kepentingan secara krusial tentang bagaimana tindakan secara nyata tentang pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela.

### **1. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengawasan**

Fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau *control* (melalui pertanyaan, interpelasi, angket), serta pendidikan politik. Pada dasarnya pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD merupakan tugas yang dilaksanakan oleh komisi untuk mengontrol, melihat atau *review*, mempelajari, dan mengevaluasi secara mendalam pada

berbagai aspek, yaitu: pengawasan seharusnya menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan disini tugasnya untuk memantau pejabat eksekutif pada saat melaksanakan peraturan sesuai dengan maksud lembaga legislative. Namun kenyataannya, praktik di DPRD kebanyakan tidak dilaksanakan dan tidak mendapatkan perhatian juga tidak ada alokasi sumberdaya yang cukup dari DPRD, hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektifitas pelaksanaan peraturan daerah. Pada dasarnya DPRD menganggap bahwa Pemerintah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Pengawasan internal pula juga diperlukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya.

## **2. Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan**

Dalam rangkaian pengawasan peraturan dan kebijakan, oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menjadi hak DPRD antara lain sebagai berikut:

1. Meminta pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
2. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah;
3. Mengadakan penyelidikan; dan
4. Mengajukan pernyataan pendapat.

Hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah hak yang paling populer karena sifat politisnya. DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasannya berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah tentang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan setiap akhir tahun anggaran; dan
2. Hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

DPRD Kabupaten/Kota khususnya dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanggungjawaban yang ditolak DPRD, kepala daerah secara aturan harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kepala Daerah yang sudah melengkapi atau menyempurnakan pertanggungjawabannya kemudian menyampaikan kembali kepada DPRD, apabila pertanggungjawaban itu sudah dinyatakan ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada presiden. DPRD dengan kewenangan yang dimiliki dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penolakan pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila Kepala Daerah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD seperti yang telah disetujui DPRD; dan
3. Melanggar ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain.

Kewenangan dan mekanisme tersebut merupakan dasar pijak politik yang kuat bagi DPRD, terutama ketika kepentingan-kepentingan lain diperhitungkan. Sementara pelaksanaan APBD relatif lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mempunyai indikator keberhasilan dan ketaatan yang lebih fleksibel untuk ditafsirkan. Pimpinan DPRD meneruskan kepada pemerintah daerah agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterangan atau mengadakan penyelidikan, apabila usul meminta keterangan atau mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan DPRD.

Sementara meminta keterangan dapat dilakukan dengan menghadirkan pejabat pemerintah di DPRD, pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus

yang dibentuk untuk itu. Secara lebih khusus penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya penyelidikan ini dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Hak DPRD untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan dilakukan dalam berbagai tingkat, yaitu pembahasan Perda, pembahasan RAPBD, dan perumusan rekomendasi kebijakan dari hasil pengawasan. Mengenai paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti.

Pelaksanaan yang mungkin sering terjadi adalah karena pelaksanaan fungsi dan tugas ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Dalam hal pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma-norma antara lain, obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat serta yang terakhir yaitu bersifat mendidik dan dilakukan secara berkelanjutan.

### **3. Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD**

Anggota DPRD pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. DPRD sebagai lembaga faktor-faktor lain yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- b. Lemahnya kemampuan manajerial atau kepemimpinan;
- c. Lemahnya faktor dukungan (kontrol) masyarakat;
- d. Keterbatasan dana;
- e. Pemahaman tentang fungsi pengawasan yang tidak tepat/keliru.



- f. Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD.
- g. Para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan (*power oriented*);
- h. Lembaga legislatif yang diharapkan sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## 2.5 Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah dalam melestarikan objek wisata yang ada pada wilayah tersebut. Pengelolaan pariwisata yang baik harus diciptakan melalui kerjasama dari pihak yang terlibat baik itu masyarakat, wisatawan ataupun pemerintah daerah. Dengan adanya tata kelola pariwisata yang baik, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar (Amdi, 2021). Namun, saat ini masih dijumpai kendala penyelenggaraan kepariwisataan dalam upaya pembangunan pariwisata, untuk itu diperlukan pengawasan yang tepat agar proyek dan kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok yaitu kelompok masyarakat terkena kebijakan dan kelompok pengambil keputusan. (Susanti & Pambudi, 2018) menyebutkan bahwa peran keikutsertaan masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggungjawab.

Secara sederhana didefinisikan *sebagai feed forward* information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu). Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan instrument hubungan timbal balik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan yang bersangkutan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keselarasan hubungan sosial antara dua kelompok yang beda kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup pada daerah tersebut.

Tujuan dari kerjasama ini ialah untuk mempersempit kesenjangan terhadap lingkungan antar dua kelompok yang terjadi selama ini, untuk itu pendekatan masyarakat dengan pihak pemerintah diharapkan dapat menjadi bibit kebijakan pengelolaan objek wisata yang lebih baik. Berdasarkan sifatnya, menurut (Marsa, 2020) peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu: konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*).

Sedangkan dalam pendekatan yang bersifat konsultatif, meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat disini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Pendekatan partisipatif yang bersifat konsultasi ini dalam penggolongan peran serta masyarakat. Berbeda dengan konsultasi, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan.

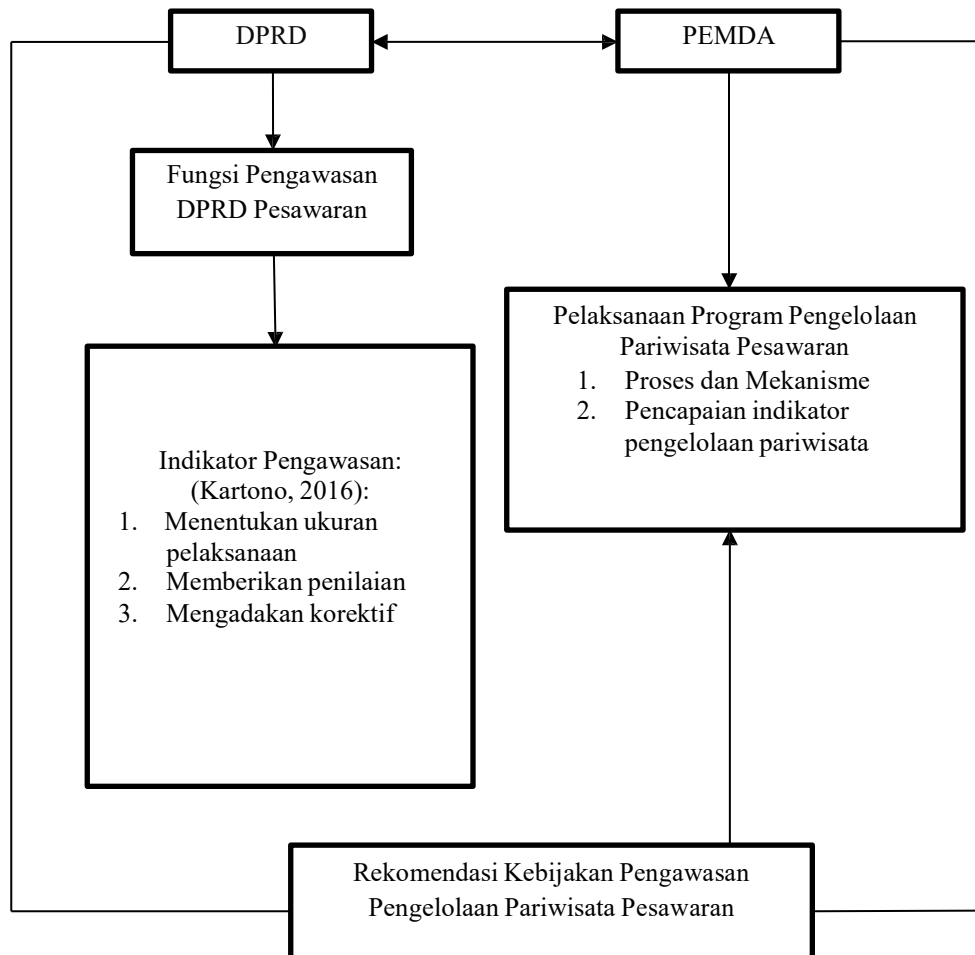
Karena diposisikan sebagai mitra atau rekan, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat untuk upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan (Sagala & Aiman, 2022). Dari beberapa uraian diatas, fungsi pengawasan sangat dibutuhkan pada saat melakukan perencanaan pemerintah agar menunjang kelancaran tugas pemerintahan, pengelolaan, dan pembangunan baik secara nasional maupun daerah.

Perlunya pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum baik untuk masyarakat ataupun badan tata usaha dari negara itu sendiri. Ketika pengawasan memiliki tujuan yang jelas, maka hal tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan tugas dengan baik. (Hakim, 2019). Adanya fungsi pengawasan dapat memberikan kewenangan untuk memberi masukan ataupun saran agar tidak terjadi penyimpangan kegiatan atau penyalahgunaan kegiatan yang dibuat khususnya dalam pengelolaan pariwisata.

## **2.6 Kerangka Pikir**

Agar tujuan penelitian dapat didapat dan dilakukan secara sistematis, maka diperlukan susunan konsep kerangka pikir yang dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. DPRD sebagai wakil rakyat harus memiliki kepekaan terhadap proses manajemen pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. DPRD sebagai fungsi pengawasan harus mengerti, mengenal, dan memahami setiap proses pengelolaan pariwisata baik yang sudah dijalankan maupun yang sedang dijalankan. Berdasarkan studi awal peneliti tentang bagaimana Komisi II DPRD Pesawaran mengelola dan mengawasi sektor pariwisata kabupaten Pesawaran, hal ini akan berdampak pada rencana pengelolaan pariwisata pada tahun atau

periode berikutnya yang diharapkan dapat menciptakan siklus positif dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Pesawaran. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian  
 Sumber: Data diolah peneliti, 2022

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang gunanya untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Penelitian kualitatif berkenaan pada data yang bukan berupa angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif atau uraian (Sugiyono, 2017). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam terhadap masalah atau isu yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi, dan fokus grup yang nantinya ketika semua langkah sudah terpenuhi maka langkah akhir ialah membuat laporan menjadi struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2017).Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan secara objektif yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, pengumpulan dokumen resmi tentang pengawasan DPRD dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan sebuah domain atau alamat yang terkait dengan situasi sosial (Sugiyono, 2017). Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting karena berfungsi untuk menghindari jebakan limpahan volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, dan untuk menghindari hal-hal yan

tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Artinya, fokus penelitian memberikan solusi masalah khusus untuk masalah yang akan diteliti saja. Fokus pada penelitian ini adalah indikator yang berkaitan dengan teori pengawasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Pesawaran, yaitu:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan
2. Memberikan penilaian
3. Mengadakan korektif

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertujuan untuk membatasi daerah pada tempat yang diteliti. Lokasi penelitian ini merupakan tempat penelitian melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di DPRD Kabupaten Pesawaran dan lokasi pariwisata Kabupaten Pesawaran.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian ini merupakan ketua dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran beserta anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, dan juga jejeran lembaga dibawahnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan sebuah teknik penentuan informan yang khusus dan berkaitan dengan tujuan dan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengawasan Komisi II DPRD Pesawaran dalam mengelola pariwisata Pesawaran. Berikut merupakan infroman dalam penelitian:

Tabel 4 Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Irfani, S.P	Sekretaris Komisi II DPRD Pesawaran
2	Kamil, S.T.,M.M	Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Wisata
3	Aris Apriyadi, S.E	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
4	Annis Purnawatiningsih, S.H.,M.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
5	Aan	Pengelola Lahan Wisata Pantai Mutun
6	Meli	Staff Administrasi Wisata Sari Ringgung
7	Eem	Masyarakat dan pedagang sekitar objek wisata

*Sumber: Data diolah peneliti, 2022*

### 3.5 Jenis Data

Adapun sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan apabila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan data primer yaitu data langsung didapatkan dari informan penelitian, sumber sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari dokumen atau jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya (Sugiyono, 2017). Berdasarkan klasifikasi sumber penelitian, peneliti membagi jenis-jenis sumber yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer dari wawancara terhadap para informan atau narasumber. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran, Dinas Pariwisata Pesawaran, Masyarakat sekitar objek wisata Kabupaten Pesawaran.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan penulis melalui sumber yang valid seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang dapat membantu proses penyelesaian penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam *setting*, sumber data, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari *setting* data, dapat dikumpulkan dari *setting* alamiah, pada laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen di rumah dengan beberapa responden, pada seminar, diskusi, di jalan, dan lain sebagainya. Apabila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Akan tetapi, pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak dibutuhkan pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan juga dokumentasi (Sugiyono, 2017).

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode tanya jawab yang dilakukan peneliti pada narasumber dalam sebuah pembicaraan yang nantinya akan didapatkan hasil penelitian yang dibutuhkan pada penelitian secara mendalam dari wawancara tersebut. Wawancara sebelumnya harus menentukan jumlah informan, sesuai dengan klasifikasi dan karakteristik dalam rangka untuk memperoleh data mengenai efektivitas Komisi II DPRD Pesawaran dalam pengelolaan pariwisata di Pesawaran. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dalam penggunaannya lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta narasumber memberikan pendapatnya dan ide-idenya.

#### 2. Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif berfungsi untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan dan pendataan yang berkenaan dengan objek yang akan menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran atau kevalidan terkait fakta di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan efektivitas Komisi II DPRD Pesawaran dalam menjalankan pariwisata daerah Pesawaran. Pengamatan ini akan mendapatkan



keterangan data yang lebih akurat perihal yang diteliti terkait dengan efektivitas Komisi II DPRD Pesawaran dalam pariwisata daerah pada tahun 2021.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Dokumentasi pada penelitian ini ialah berupa gambar atau foto yang langsung diambil oleh peneliti di kantor DPRD Pesawaran ataupun beberapa lokasi pariwisata yang dilakukan dikelola oleh Komisi II DPRD Pesawaran.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka (Sugiyono, 2017). Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan selanjutnya dokumentasi yang nantinya akan disusun dalam teks yang diperluas and dibagi dalam 3 alur kegiatan secara bersamaan, yaitu:

### 1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (trianggulasi data). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber yaitu menguji keabsahan data daengan mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan kevalidan, kepercayaan informasi yang diperoleh dari anggota Komisi II DPRD Pesawaran. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari- berbulan-bulan sehingga akan mendapatkan data yang banyak dan bervariasi.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, merangkum, memilih, dan transformasi data yang pokok yang

sesuai dengan focus penelitian kualitatif yang muncul dari catatan lapangan setelah pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

### 3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang terkait, tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan keputusan.

### 4. Kesimpulan Data

Simpulan merupakan sebuah intisari dari penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang didasarkan oleh uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode induktif atau deduktif dengan demikian simpulan dapat menjawab rumusan masalah penelitian, akan tetapi tetap berkemungkinan juga tidak apabila terdapat sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi.

## 3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan hal yang diperlukan dalam penelitian kualitatif agar data lapangan dapat diperoleh seobjektif mungkin. Berikut teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Derajat Kepercayaan

1. Trianggulasi: digunakan karena merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi pada saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dari berbagai sudut pandang. Untuk itu peneliti melakukan wawancara lebih dari satu pihak informan yang berasal dari unsur yang berbeda-beda.

2. Perpanjangan Waktu Pengamatan: dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan perpanjangan pengamatan seperti ini peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber yang pernah ditemui maupun belum. Tujuannya untuk mengakrabkan hubungan peneliti dengan narasumber, sehingga berkemungkinan mendapatkan data lebih banyak.

b. Keteralihan

Pengujian ini dilakukan agar oranglain dapat memahami hasil penelitian sehingga berkemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Untuk itu, peneliti harus membuat hasil yang rinci, sistematis, jelas, dan terjamin kevalidannya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian dengan sedetail mungkin dengan tetap menggambarkan konteks tempat penelitian.

c. Kebergantungan

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan.

d. Kepastian Data

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada didalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Pengujian ini dapat dicapai mealalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km<sup>2</sup> atau 117.377 Ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 Ha. Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara. Kabupaten Pesawaran terdiri atas 37 pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Padang Cermin dengan ketinggian 1.604 m. Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pesawaran merupakan daratan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Di Gedung Tataan sebagai pusat kota, misalnya, mempunyai tinggi 140,5 m dari permukaan laut. Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km<sup>2</sup> atau 117.377 Ha dengan 13% digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 87% merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang

terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara.



Gambar 2 Peta Kabupaten Pesawaran  
*Sumber: Dinas Pariwisata Pesawaran, 2022.*

Kabupaten Pesawaran terdiri atas 39 pulau yang tersebar di antara 11 Kecamatan. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung yaitu Gunung Ratai di Kecamatan Padang Cermin dan yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Kedondong dengan ketinggian 1.662 m. Sungai

terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km<sup>2</sup>. Sedangkan aliran sungai-sungai kecil diantaranya Way Penengahan, Way Kedondong, Way Kuripan, Way Tahala, Way Tabak, Way Awi, Way Padang Ratu, Way Ratai, dan lain-lain. Kabupaten Pesawaran merupakan daratan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi. Di Gedung Tataan sebagai pusat kota, misalnya, mempunyai tinggi 140,5 m dari permukaan laut. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 M dari permukaan laut.

#### **4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran**

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila perlu secara berkesinambungan melakukan optimalisasi dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sehingga kedudukannya sebagai unsur Pemerintahan Daerah akan semakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar.

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi dan Misi DPRD ialah:

**“Visi”** Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

“Misi” Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran yaitu:

- a. Menciptakan tertib administrasi keuangan dalam menunjang kegiatan dewan dan sekretariat
- b. Mewujudkan fasilitas kantor yang memadai bagi Anggota Dewan dan Staf Sekretariat dalam menjalankan tugas
- c. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap Anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini merupakan struktur keanggotaan DPRD Komisi II sebagai Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran:

Tabel 5 Daftar Anggota Komisi II DPRD Pesawaran

KOMISI II		
No	Nama	Jabatan
1	Saptoni, S.H	Ketua Komisi II
2	Evi Susina, S.H	Wakil Ketua Komisi II
3	Atut Widiarpi, S.Sos	Sekretaris Komisi II
4	Udi Adriansyah	Anggota
5	Harno Irawan	Anggota
6	Fahmi Fahlevi, S.Pd	Anggota
7	Irfani, S.E	Anggota

<b>8</b>	Rifki Assofani, S.H, M.H	Anggota
<b>9</b>	Evi Dwiana Listiani	Anggota
<b>10</b>	Mustika Bahrum, S.E, M.M	Anggota

*Sumber: Data diolah peneliti, 2023.*

#### **4.1.1 Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran**

Tugas Sekretariat DPRD Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan program dan kebijakan di bidang Sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD;
- b. Memimpin, membina, mengkoordinasi, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang Sekretariat DPRD agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam bidang Sekretariat DPRD, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sekretariat DPRD sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinir staf terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
- f. Menyiapkan rencana mengolah dan menelaah dan serta mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pimpinan DPRD dan atau Alat kelengkapan Dewan;
- g. Melakukan pembinaan administratif dalam arti membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan serta pemeliharaan dan pembinaan ketertiban serta keamanan DPRD;
- h. Menyelenggarakan persidangan, rapat dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- i. Membuat laporan serta evaluasi atas kegiatan sekretariat DPRD dalam setiap tahun kegiatan;



- j. Membagi habis tugas kegiatan Sekretariat DPRD di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan di lingkungan Sekretariat DPRD, agar setiap aparatur Sekretariat DPRD mengetahui dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya.

### 4.3 Dinas Pariwisata Pesawaran

#### “Misi”

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan public yang berkualitas, akuntable, dan berkinerja tinggi
- Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata
- Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, ungu, berkarakter dan berdaya saing
- Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah
- Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Memiliki potensi 50 desa wisata dengan panjang pantai  $\pm$  120km yang membentang sepanjang teluk Lampung , dan memiliki 39 pulau dengan 3 pulau terbesar yaitu Pahawang, Kelagian, dan Legundi. Sedangkan wisata pantau, Pesawaran memiliki 18 pantai, 19 air terjun, 3 sumber air panas, 1 kampung tapis, 6 wisata sejarah, 3 agrowisata, dan 1 hortipark. Dengan banyaknya potensi objek wisata tersebut, Pemerintah Pesawaran memiliki strategi daya tarik wisata dan ekonomi, yaitu:

1. Wisata budaya
2. Wisata bahari
3. Wisata sejarah
4. Wisata alam

5. Wisata kerajinan
6. Wisata kuliner

Berikut merupakan wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran:

**a. Objek Wisata Air Terjun:**

1. Air Terjun Sinar Tiga
2. Air Terjun Sinar Banyu Mandiri
3. Air Terjun Tundo Telu
4. Air Terjun Anglo Kali Awi
5. Air Terjun Kembar Rindu Alam
6. Air Terjun Ciupang
7. Air Terjun Way Sabu
8. Air Terjun Sentul Jaya
9. Air Terjun Talang Mulya
10. Air Terjun Talang Rabun
11. Air Terjun Curug Pitu
12. Air Terjun Abah Uban
13. Air Terjun Hurun
14. Air Terjun Penyarian
15. Air Terjun Wiyono
16. Air Terjun Bogorejo
17. Air Terjun Gunung Tanjung
18. Air Terjun Kusuma Sari
19. Air Terjun Kusuma Jaya
20. Air Terjun Curuk Idrus
21. Air Terjun Tirta Mulya
22. Air Terjun

**b. Objek Wisata Pantai:**

1. Pantai Tanjung Putus
2. Pulau Pahawang

3. Pagar Jaya
4. Mutun (MS Town Beach)
5. Mutun Haruna Jaya
6. Queen Arta
7. Teluk Saung Resort & Pemancingan Apung
8. Lempasing
9. Mutun Asri
10. Putra Mutun
11. Bensor Resort
12. Marines Eco Park (Pantai Lembing
13. Ketapang Dalam / Cuku Upas
14. Klara
15. Dewi Mandapa
16. Ringgung (Pantai Sari Ringgung)
17. Teluk Hantu
18. Kuceng Reang
19. Muara
20. Pemandangan
21. Sukamaju (atraksi lumba-lumba)
22. Pancur Permai
23. Batu Mandi
24. Pantai / Pulau Lahu
25. Pantai / Pulau Kelagian Balak
26. Pantai / Pulau Kelagian Lunik (taman laut)
27. Pantai / Pulau Tangkil Resort
28. Pantai / Pulau Mahitam (taman laut)
29. Pulau Lelangga Balak (taman laut)
30. Pulau Lelangga Lunik (taman laut)
31. Pantai / Pulau Balak (taman laut)
32. Pulau Menggudu
33. Pulau Wayang
34. Pantai / Pulau Loh
35. Pantai / Pulau Lunik
36. Pulau Umang – umang
37. Pulau Legundi Tua
38. Pulau Siuncal
39. Pulau Batu Ligel
40. Pulau Sijebi

41. Pulau Tulang Kalik
42. Pulau Hiu
43. Pantai / Pulau Centigi
- c. Objek Wisata Pemandian atau Kolam Renang:**
  1. Air Panas Margodadi
  2. Air Panas Lubuk Bakha
  3. Air Panas Way Urang
  4. Kolam Renang (WLC)
  5. Kolam Renang Pesawaran City
  6. Kolam Renang W&W
  7. Kolam Renang Tirta Garden
- d. Objek Wisata Embung:**
  1. Embung Rawa Kuning
  2. Bendungan Argo Guruh Tegineneng
  3. Embung Purworejo
- e. Objek Wisata BumPer:**
  1. Youth Camp TAHURA Wan Abdurrahman
  2. Bumper Bukit Cendana
  3. Bukit Lantana
  4. Bukit Anaya
  5. Bukit Punggung Naga
  6. Bukit Kendeng
- f. Agrowisata Pesawaran:**
  1. Agrowisata BPPBL Hanura
- g. Objek Wisata Bukit dan Kafe:**
  1. D'Junjungan
  2. Muncak Teropong Laut
  3. Kubah Batu
  4. Vila Gardenia
  5. Tabura Pelayangan
  6. Batu Perahu
- h. Objek Wisata Sejarah:**
  1. Museum Nasional Ketransmigrasian
  2. Situs Batu Pertapaan
  3. Desa Wisata Tradisional Pekon Ampai
  4. Muara Bawang
  5. Desa Wisata tapis
  6. Pulau Petapaan
  7. Pulau Keramat Apung

Kabupaten Pesawaran mempunyai percepatan kearifan lokas pembangunan wisata bahari dan pesisir, yaitu:

- Kawasan pedesaan wisata berbasis pantai, kuliner dan ekonomi kreatif
- Kawasan pedesaan wisata berbasis bahari dan warisan budaya
- Kawasan pedesaan wisata berbasis kerajinan tangan tapis, dan
- Kawasan pedesaan wisata berbasis alam air terjun.

Kabupaten Pesawaran juga menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan wisata bahari dan pesisir, yang mencakup:

- Akses,
- Infrastruktur,
- Fasilitas,
- Kelembagaan pengelolaan, dan
- Investasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Staf Ahli Bupati Pesawaran. Tugas adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.1 Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran**

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan ekonomi kreatif

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata
7. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia
8. Pelayanan administratif

### **Tugas dan fungsi masing-masing bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran:**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Pariwisata.
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Pariwisata
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan evaluasi dan pelaporan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset
- c. Pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Dinas Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Sub Bagian keuangan.

### **3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
- Pelaksanaan program dan kegiatan bidang

- Pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh:

- Seksi Obyek Daya Tarik Wisata
- Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata
- Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pemasaran Pariwisata Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
- Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
- Pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dibantu oleh:

- Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata
- Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran
- Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata



## **5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata**

Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
- Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
- Pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dibantu oleh:

- Seksi Hubungan Kelembagaan Pariwisata
- Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
- Seksi Penelitian dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan

## **6. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata**

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mengordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Industri Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
- Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
- Pelaksanaan pembinaan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dibantu oleh:

- Seksi kemitraan usaha pariwisata
- Seksi standar usaha pariwisata
- Seksi investasi usaha pariwisata.

#### 4.2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pesawaran

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Pesawaran memiliki SDM yang menunjang tercapainya tujuan tersebut, yaitu:

Tabel 6 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pesawaran

Nama	Jabatan
Anggun Saputra, S.E., M.M	Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran
Fitri Sanawiyah Pakpahan, SKM,M.KM	Sekretaris
Heru Adi Putra, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Annis Purwatiningsih,S.H.,M.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
Elis Herawati, S.S.,M.M	Sub Koordinator Keuangan dan Aset
Suspa Rita, S.H., M.H	Plt. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
Azhari,S.IP	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Yudiana, S.Pd., M.M	Kepala Bidang Destinasi & Industri Pariwisata
Aris Apriyadi, S.E	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Novelina	Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata

Susanti, S.E., M.M	Sub Koordinasi Strategi & Komunikasi Pemasaran Pariwisata
Kamil, S.T., M.M	Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Wisata
Fahdian, S.E	Sub Koordinator Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata
Heni Gustinawati, A.Md	Sub Koordinator Riset, Edukasi Pengembangan & Infrastruktur
Roni Saputra, S.I.,Kom	Sub Koordinator Pengembangan SDM Kepariwisata & Ekonomi Kreatif
Novi Isnasari, S.H., M.M	Sub Koordinator Proses Permodalan & Pemasaran
Handayani, S.E., M.M	Sub Koordinator Pengembangan Pemasaran Wisata Dalam & Luar Negeri
Ferdy Maylani, S.Kom	Sub Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur
Risendy Nopriza, S.Sn	Sub Koordinator Fasilitas HKI & Hubungan Antar Lembaga & Wilayah
Unit Pelayanan	

*Sumber: Dinas Pariwisata Pesawaran, 2023.*

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini maka didapatkan kesimpulan:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan: Proses sebelum melakukan kegiatan untuk pengelolaan pariwisata, DPRD sebagai fungsi pengawasan melakukan rapat untuk menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan dan bagaimana proses pengecekan saat kegiatan berlangsung, bentuk hasil dari rapat tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan control atau kunjungan setiap bulannya pada saat kegiatan dilakukan.
2. Memberikan penilaian: Pengelolaan pariwisata ini sudah dapat dikatakan mampu berjalan dengan baik. Penerapan kegiatan, pendanaan, dan kerjasama dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadikan kinerja pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran menjadi lebih baik. DPRD bertugas sebagai fungsi pengawasan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran yang strukturnya terletak pada alat kelengkapan di DPRD dan sifatnya tetap. Komisi II DPRD sebagai fungsi pengawasan dibentuk untuk menjaga dan mengevaluasi agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan termasuk Dinas Pariwisata Pesawaran.
3. Memberikan korektif: DPRD Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran yang berupa pembangunan sarana dan prasarana dan akses jalan yang digunakan pengujung untuk menempuh perjalanan menuju ke objek wisata, langkah-

langkah yang dilakukan oleh DPRD sebagai fungsi pengawasan ialah mengadakan kontrol dengan Dinas Pariwisata dan kerjasama pada pihak pengelola lahan untuk segera melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata pada pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran setelah disahkannya APBD tahun anggaran 2022. Pengawasan yang baik merupakan sebuah proses dimana perwakilan rakyat mempengaruhi dan memberikan contoh kepada masyarakat dalam upaya mencapai tujuan kegiatan pengelolaan pariwisata yang baik dan benar. Peran dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran sudah memberikan hasil yang baik dan ideal, Pemerintah Daerah sudah mulai gencar melakukan pembangunan fasilitas sarana dan prasana untuk tata kelola yang mendukung bergeraknya objek wisata agar lebih baik dari dari waktu ke waktu. Selain itu Pemerintah Daerah kabupaten Pesawaran juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pengelola lahan wisata sehingga apabila adanya kerjasama akan mempermudah kedua belah pihak untuk memajukan pariwisata di Pesawaran.

Pihak Pemerintah Daerah sebagai fungsi pengawasan juga dinilai sering melakukan kunjungan pada objek wisata dan melakukan kegiatan pembangunan untuk objek wisata yang digerakkan oleh Pemerintah Daerah. Peran DPRD sebagai fungsi pengawasan yang ideal juga dapat dilihat dari gencarnya promosi dan penyebaran informasi terkait objek wisata di Pesawaran sehingga masyarakat semakin banyak mengetahui dan mendapatkan informasi terkait pariwisata yang ada di Pesawaran dengan harapan akan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Pesawaran. Hal ini harus dilakukan dengan cara memberikan citra yang baik pada tiap pengunjung agar akan adanya keputusan untuk berkunjung kembali di objek wisata Pesawaran diwaktu yang akan datang.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti rekomendasikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran terkait pengawasan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran masih belum merata untuk pengelolaan pariwisatanya, untuk itu disarankan pada pihak DPRD Komisi II Pesawaran mempererat kerjasama dengan semua pihak yang berhubungan dengan objek wisata yang ada.
2. Selain perwakilan rakyat DPRD, pengelolaan pariwisata juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar objek wisata, untuk itu penting untuk mengikutserakan sumber daya manusia disekitar objek wisata sehingga Kabupaten Pesawaran memiliki SDM yang berkualitas dan akan mempengaruhi kenyamanan pengunjung yang datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. 2016. Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Amdi, N. 2021. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. (*Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*).
- Anam, S., & Anwar, K. 2020. Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10 No, 1.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104-1116.
- Arso, T., & Abas, G. H. 2021. Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap APBD Tahun 2019. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 438-449.
- Bagunda, N., Tulus & Laloma. 2019. Manajemen Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84)
- Bahari, A. F. & M. Ashoer, 2018. Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)*, 5(1), 69-78.
- <https://biroadpim.lampungprov.go.id>, 2022.
- Bps.go.id. 2022. Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Desember 2019 Mencapai 1,38juta Kunjungan. [https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah\\_kunjungan\\_wisman-ke-indonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta\\_kunjungan](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/1711/jumlah_kunjungan_wisman-ke-indonesia-desember-2019-mencapai-1-38-juta_kunjungan). Diakses pada 10 September 2022.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bantuan, D.N., Saerang & Gamaliel. 2019. Analisis Efektivitas Kinerja Pendapatan (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang

- Mongondow Tahun 2016-2018). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).
- Busro, M. 2018. *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media.
- Dilapanga, C. S., Laloma, A., & Londa, V. 2020. Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(90).
- Dinas Pariwisata Pesawaran, 2022. [pesawarankab.go.id](https://pesawarankab.go.id), 2022. <https://pesawarankab.go.id> (diakses pada 2 Oktober 2022)
- Diniyah, T. 2021. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Malang. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(1).
- Hakim, M. 2019. Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI No 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. *Univeristas Medan Area*
- Khairiah, N., & Safira, B. 2021. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pariwisata Kota Medan. (*Doctoral dissertation, UMSU*)
- Kartono, K. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. 2019. Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *Jurnal eksekutif*, 3(3).
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Marsa, R. J. 2020. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung (*Doctoral dissertation, Univesitas Komputer Indonesia*).
- Pendit, Nyoman S. 2010. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Priansa, Doni Juni dan Garnida A. 2013. *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Professional*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Pasal 79 Tentang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Pasal 81 Tentang Pembidangan Tugas Masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran



- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Pasal 21 Tentang Fungsi Pengawasan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. 2018. Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Pasal 1 ayat (4) Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Perwakilan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen, Jilid 1 Edisi 13*, Alih Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.
- Rosa, D. Y. 2018. Pengaruh Kontribusi Objek Wisata Pantai Gandorih Pariaman Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pariaman. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 4(2).
- Sagala, I., & Aiman, M. 2022. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Tebo. (*Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*).
- Sahara, F. N. A., Iqbal, M., & Sanawiri, B. 2016. Analisis Motivasi Berkunjung Wisatawan Dan Tingkat Pengetahuan Wisatawan Tentang Produk Industri Kreatif Sektor Kerajinan (Studi Pada Wisatawan Domestik di Kota Batu, Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 35(2), 146-154.
- Susanti, A., & Pambudi, A. 2018. Manajemen Objek Wisata Pantai Jatimalang Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. *Adinegara*, 7(6), 723-738.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sutrisno, Edy. 2018. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gusti Ngurah. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar : Pustaka Larangan.
- Swesti, W. 2019. Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Banda Aceh. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 49-65.

Wicaksono, M.S., & Yunitasari, D, 2018. Efektivitas *Endorser* dalam Promosi Pariwisata Indonesia. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 1-8.

[www.pusdiklatpemda.com](http://www.pusdiklatpemda.com), 2022.

Yoeti, A, Oka. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.